

ABSTRAK

Nama : Diella Jauza

Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyebutkan bahwa terjadi kenaikan kasus korupsi di sektor desa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut. Pengelolaan keuangan desa terwujud APBDes. Oleh karena itu perlu adanya penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi peraturan dasar pengelolaan keuangan desa yang ada di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu berdasarkan pada teori Raharjo bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu masih terdapat ketidaktepatan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena tidak ada media untuk penyebaran final APBDes dalam tahap perencanaan dan penyebaran informasi realisasi APBDes akhir tahun anggaran, pada tahap pelaksanaan tidak dianggarkan untuk insentif/operasional RT RW, serta pada tahap penatausahaan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam mengoperasikan Siskeudes.

Kata Kunci : Keuangan, Desa, APBDes, Pengelolaan

ABSTRACT

Nama : Diella Jauza

Judul : *Analysis of Village Budget Management (APBDes) Based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management (Case Study in Cimanggu Village, Cimanggu District, Cilacap Regency)*

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides village authority in the context of village financial management. ICW (Indonesia Corruption Watch) states that there has been an increase in corruption cases in the village sector since the issuance of the law. Village financial management is realized in the APBDes. Therefore, it is necessary to strengthen village financial management. The Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 on Village Financial Management, is the basic regulation of village financial management in the village.

This study aims to determine the management of APBDes in Cimanggu Village based on Raharjo's theory that village financial management includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This research uses a qualitative approach and uses a descriptive type. The data sources used are primary data sources and secondary data sources obtained through data collection techniques of interviews, observation, and documentation. In addition, the data analysis technique in this study consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Based on the results of the discussion and research that has been carried out, it is known that the management of the APBDes in Cimanggu Village still has inaccuracies with Permendagri Number 20 of 2018 because there is no media for disseminating the final APBDes in the planning stage and disseminating information on the realization of the APBDes at the end of the fiscal year, at the implementation stage it is not budgeted for RT RW incentives/operations, and at the administration stage there are still overlapping jobs in operating Siskeudes.

Keywords: *Finance, Village, APBDes, Management*